

PERMOHONAN ITSBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN KEDUA OLEH  
ISTRI YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA  
(STUDI KASUS PADANG PARIAMAN)

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh*

*Gelar Magister Kenotariatan*



OLEH

NURUL FAUZA

NIM. 2120123044

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. YASWIRMAN, MA

2. Dr. NAJMI, SH., MH

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

# **PERMOHONAN ITSBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN KEDUA OLEH ISTRI YANG BERCEPASI DI LUAR PENGADILAN AGAMA**

**(STUDI KASUS PADANG PARIAMAN)**

(Nurul Fauza, BP:2120123044, Program Studi Magister Kenotariatan  
Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

## **ABSTRAK**

Perkawinan hendaknya tercatat dan memiliki bukti autentik yang diakui oleh hukum dalam rangka menjaga ketertiban hukum dan hak-hak setiap masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap pihak pasca berlangsungnya suatu perikatan perkawinan. Begitupun halnya dengan adanya perbuatan hukum pasca putusnya perkawinan. Hukum negara Indonesia hanya mengakui perceraian di hadapan sidang peradilan agama. Perkembangan zaman meningkatkan kebutuhan akan adanya “alat bukti” untuk menjamin hak-hak manusia yang dilindungi hukum. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perceraian di luar pengadilan, sehingga status perkawinan tersebut masih sah di mata hukum positif Indonesia. Karenanya, pasangan tersebut jika hendak menikah untuk kedua kalinya hanya bisa melakukan perkawinan secara *sirri* yang sah secara agama. Untuk melegalkan perkawinan kedua ini, pasangan harus terlebih dahulu mengajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama. Sayangnya, pengajuan permohonan untuk jenis perkawinan seperti ini ditolak oleh pengadilan agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian permohonan itsbat nikah untuk perkawinan kedua oleh istri yang bercerai di luar pengadilan agama dan akibat hukum bagi para pihak dari penolakan itsbat nikah oleh pengadilan agama. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik *kualitatif* yang menggambarkan secara detail mengenai subjek dan objek penelitian untuk selanjutnya teori dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh. Permohonan itsbat nikah oleh istri yang telah bercerai sebelumnya di luar pengadilan agama ditolak oleh majelis hakim karena dalam sidang baru diketahui bahwa istri selaku pemohon belum bercerai secara sah dengan suami pertamanya, sehingga majelis hakim langsung memutuskan untuk menolak permohonan tersebut pada sidang pertama.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Perceraian di Luar Pengadilan, Itsbat Nikah

## AN APPLICATION FOR ITSBAT NIKAH FOR A SECOND MARRIAGE BY A DIVORCED WIFE OUTSIDE THE COURT (CASE STUDY OF PADANG PARIAMAN)

(Nurul Fauza, BP:2120123044, Postgraduate Notary Masters Study  
Program Faculty of Law, Andalas University)

### ABSTRACT

*Marriages should be registered and have authentic evidence that is recognized by law in order to maintain legal order and the rights of every Indonesian, especially those relating to the rights and obligations of each party after a marriage contract takes place. Likewise, there is a legal action after the dissolution of marriage. Indonesian law only recognizes divorce before a religious court session. The development of the times increases the need for "evidence" to guarantee human rights protected by law. However, there are still many Indonesians who divorce outside the court, so that the status of the marriage is still valid in the eyes of Indonesian positive law. Therefore, if the couple wants to marry for the second time, they can only do a sirri marriage which is religiously valid. To legalize this second marriage, the couple must first apply for itsbat nikah to a religious court. Unfortunately, applications for this type of marriage are rejected by the religious courts. The problem in this study is the process of resolving the application for an itsbat nikah case for a second marriage by a divorced wife outside the court and the legal consequences for the parties of the rejection of itsbat nikah by the religious court. This research was conducted in Padang Pariaman Regency, West Sumatra. The population of this study were the Judges of the Pariaman Religious Court, the Head of the KUA of Batang Anai Sub-district, Padang Pariaman Regency and the parties who conducted divorce outside the religious court. The sample was taken from the entire population. The data collection technique is by interview. The data analysis technique uses qualitative techniques that describe in detail the subject and object of research and then the theory is developed based on the data obtained. The application for itsbat nikah by a previously divorced wife outside the religious court was rejected by the panel of judges because during the trial it was discovered that the wife as the applicant had not been legally divorced from her first husband, so the panel of judges immediately decided to reject the application at the first hearing.*

**Keywords:** Marriage, Divorce, Out of Court Divorce, Itsbat Nikah

